

IINDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II



Pengadilan Negeri Kota Agung
Jl. Jend. Suprpto Kota Agung,
Telp. 072222141 Fax. 072221224
Tanggamus - Lampung 24476
e-mail : info.pnkta@gmail.com

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p><u>Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100 % <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2022 Tanggal 28 April 2022 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> x 100 % <u>Perkara yang diajukan untuk restoratif</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2021 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u> x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><u>Jumlah Perkara Yang Tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</u> x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p><u>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> x 100% Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	<ul style="list-style-type: none"> Index Kepuasan Pencari Keadilan <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		peradilan	<p>penyusunan Survey Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 		Tahunan
7	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><u>Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</u> x100%</p> <p><u>Jumlah puusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM/02.3/4/2022 Tanggal 28 April 2022 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil</u> x100%</p> <p><u>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan 		
9	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u> x 100% <u>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u> x 100% <u>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</u> x 100% <u>Jumlah permohonan layanan hukum</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 		
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p><u>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</u> $\times 100\%$ <u>Jumlah permohonan eksekusi</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kota Agung, Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG



Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.
NIP 197807032002122002